



Indeks Pembangunan Manusia, Dana Alokasi Umum, dan Angkatan Kerja terhadap Ketimpangan Pendapatan

Anisya Aulia Fatonah, Asnita Frida Sebayang*

Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history:

Received : 27/9/2024

Revised : 19/12/2024

Published : 30/12/2024



Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 4

No. : 2

Halaman : 87 - 96

Terbitan : **Desember 2024**

Terakreditasi Sinta [Peringkat 4](#)
berdasarkan Ristekdikti
No. 177/E/KPT/2024

ABSTRAK

Ketimpangan pendapatan menjadi permasalahan ekonomi paling mendasar yang selalu menjadi pusat perhatian karena sulit terpecahkan hampir disetiap negara berkembang. Sebagian besar permasalahan ketimpangan pendapatan ini disebabkan karena kurangnya pendapatan yang diterima dalam memenuhi kebutuhan hidup. Berbagai upaya telah dicoba guna mengurangi tingkat ketimpangan suatu wilayah salah satunya dengan pembangunan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Dana Alokasi Umum, dan Angkatan Kerja terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jawa Barat. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel dengan pendekatan Fixed Effect Model (FEM). Hasil Cross-section effect diperoleh dua kabupaten/kota yang memiliki nilai effect tertinggi yaitu Kabupaten Bogor sebesar 0,38 persen dan Kabupaten Bandung sebesar 0,26 persen. Hasil analisis yang diperoleh, dapat diketahui bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Ketimpangan Pendapatan, Dana Alokasi Umum dan Angkatan Kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jawa Barat.

Kata Kunci: *Ketimpangan Pendapatan, Indeks Pembangunan Manusia, Angkatan Kerja.*

ABSTRACT

Income inequality is the most basic economic problem that has always been the center of attention because it is difficult to solve in almost every developing country. Most of these income inequality problems are caused by the lack of income received in meeting the needs of life. Various efforts have been tried to reduce the level of inequality in a region, one of which is economic development. This study aims to determine the effect of Human Development Index, General Allocation Fund, and Labor Force on Income Inequality in West Java Province. The analysis method used in this study is panel data regression with the Fixed Effect Model (FEM) approach. Cross-section effect results obtained two districts / cities that have the highest effect value, namely Bogor Regency by 0.38 percent and Bandung Regency by 0.26 percent. The results of the analysis obtained, it can be seen that the Human Development Index variable has a positive and significant effect on the Income Inequality variable, the General Allocation Fund and the Labor Force have a negative and significant effect on the Income Inequality variable in West Java Province.

Keywords: *Income Inequality, Human Development Index, Labor Force.*

Copyright© 2024 The Author(s).

A. Pendahuluan

Pembangunan ekonomi menjadi upaya negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Dalam kurun waktu yang panjang, Pembangunan ekonomi telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun memberikan juga berbagai permasalahan yang harus segera ditangani, diantaranya masih terdapat disparitas atau ketimpangan antar daerah (Hasanah *et al.*, 2019). Permasalahan ketimpangan merupakan salah satu masalah yang pasti timbul dalam pembangunan, walaupun pada dasarnya ketimpangan berhubungan erat dengan proses pembangunan itu sendiri. Menurut (Todaro & Smith, 2011) pembangunan ekonomi tidak hanya tentang pertumbuhan PDB, penyediaan lapangan kerja, pengentasan masalah kemiskinan, namun juga menanggulangi adanya permasalahan ketimpangan antar daerah disuatu negara. Di Indonesia, ketimpangan di setiap daerah menandakan belum meratanya pembangunan ekonomi di seluruh daerah di Indonesia, hal tersebut menjadi tugas penting pemerintah pusat daerah untuk saling bekerja sama mengatasi ketimpangan (Sukma, 2021).

Sebagai negara berkembang negara Indonesia perlu menjadikan pengentasan ketimpangan ini menjadi sebagai sebuah tujuan dari pembangunan nasional yang tertuang dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) seperti “Mengurangi ketimpangan di dalam negara dan di antara negara-negara di dunia (*Reduce inequality within and among countries*)”. Hal tersebut disebabkan bahwa ketimpangan selalu menjadi isu yang serius di suatu wilayah karena dampak yang ditimbulkan sangat besar. Jika ketimpangan dibiarkan terus meninggi dan tidak segera diatasi akan menimbulkan berbagai masalah yang kompleks sehingga menimbulkan dampak negatif seperti inefisien ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas serta ketimpangan yang tinggi pada umumnya dipandang tidak adil.

Ketimpangan pendapatan menjadi persoalan dalam melakukan pembangunan ekonomi baik nasional maupun daerah (Raziq & El Hasanah, 2023). Ketimpangan pendapatan didefinisikan sebagai adanya perbedaan pendapatan yang didapat antara daerah satu dengan daerah yang lain atau dapat diartikan juga sebagai perbedaan pendapatan antara individu satu dengan individu lain di satu daerah/wilayah yang sama (Khoirudin & Musta'in, 2020). Ketimpangan pendapatan yang terjadi di masing masing daerah tentu akan menyebabkan adanya kecemburuan sosial diantara orang yang memiliki pendapatan tinggi.

Ketimpangan pendapatan masih sangat terlihat di Indonesia. Pulau Jawa yang merupakan tumpuan ekonomi bagi pemerintah masih belum bisa terlepas dari isu ketimpangan (Nadhifah & Wibowo, 2021). Konsentrasi ekonomi di Pulau Jawa terlihat kurang adil bagi daerah lain, dimana luas pulau ini lebih kecil daripada pulau lain seperti Sumatra, Kalimantan serta Sulawesi. Pulau Jawa ternyata menyokong lebih dari 50% kegiatan ekonomi. Hal ini menjadi bukti bahwa terdapat ketidakadilan yang disebabkan karena pulau Jawa lebih kecil dibandingkan pulau lainnya (Prastiwi *et al.*, 2020), jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di beberapa wilayah Provinsi di Pulau Jawa, maka pertumbuhan ekonomi Jawa Barat mengalami pertumbuhan yang baik sehingga berada di posisi tertinggi. Pulau Jawa menjadi penyumbang utama dalam perekonomian Indonesia karena memiliki tingkat kemajuan pembangunan tertinggi, konsentrasi sumber daya manusia, dan infrastruktur yang lengkap. Menurut Badan Pusat Statistik, Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, mencapai sekitar 57%. Selain itu, Pulau Jawa juga memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat, didukung oleh sektor industri, perdagangan, dan jasa-jasa. Dengan demikian, Pulau Jawa memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia karena kontribusi secara signifikan terhadap PDB dan memiliki berbagai keunggulan yang mendukung aktivitas ekonomi (Yoertiara & Feriyanto, 2022).

Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi di Provinsi Jawa Barat tidak diikuti dengan pemerataan pendapatan yang diterima oleh setiap lapisan masyarakat (Khusnul Khuluk *et al.*, 2021) Ketimpangan ekonomi di Provinsi Jawa Barat masih cukup tinggi, dimana Gini Ratio Jawa Barat selalu berada di atas rata-rata nasional sejak tahun 2018. Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2018–2022 menempati posisi tertinggi setelah DI Yogyakarta, sebagai provinsi dengan Gini Ratio paling tinggi di Indonesia. Gini Ratio Jawa Barat pada tahun 2022 adalah 0,412, sementara Gini Ratio nasional adalah sebesar 0,381. Ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2018 hingga 2022 cukup tinggi. Fakta ini mencerminkan bahwa upaya pemerintah provinsi tersebut dalam mengatasi ketimpangan pendapatan belum mencapai hasil optimal. Meskipun pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat cukup tinggi dan memiliki peran

penting dalam mendorong perekonomian pulau Jawa karena memiliki populasi penduduk yang besar sehingga pasar domestiknya sangat luas serta pertumbuhan ekonomi yang pesat didukung oleh sektor industri, perdagangan, dan jasa-jasa. Oleh karena itu, seharusnya kondisi perekonomian di wilayah tersebut sudah mengalami peningkatan yang lebih signifikan. Masalah ketimpangan pendapatan juga sudah menjadi permasalahan pembangunan yang dimana disebutkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022.

Salah satu faktor yang diduga menjadi penyebab ketimpangan atau ketidakmerataan distribusi pendapatan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM dan ketimpangan pendapatan memiliki hubungan terkait. Tingginya kualitas sumber daya manusia akan mempengaruhi peningkatan keterampilan, penguasaan teknologi dan produktivitas penduduk (Ramadhan, 2020). Hal tersebut dapat diketahui bahwa pendidikan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan akan mengurangi ketimpangan pendapatan karena pendidikan berperan di dalam meningkatkan produktivitas angkatan kerja (Violin & Lutfi, 2022). Tidak meratanya IPM diberbagai daerah menyebabkan terdapat daerah yang lebih maju karena kualitas manusianya lebih baik dan ada daerah yang tidak maju karena kualitas manusianya rendah sehingga dapat mendorong kenaikan ketimpangan pendapatan.

Dalam upaya mengatasi ketimpangan pendapatan pemerintah memberikan dana yang ditransfer dari pemerintah pusat ke daerah yang bertujuan untuk menjembatani kesenjangan anggaran dan menyeimbangkan kemampuan keuangan antar pemerintah daerah untuk mendukung kemandirian kinerja pemerintah daerah. Hal ini juga diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepala daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan/kesenjangan pendanaan pemerintahan antar-daerah serta mendorong dan meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah demi kesejahteraan masyarakat (Wulandari & Rahmawati, 2022).

Di sisi lain, Pertumbuhan penduduk berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja, yang artinya semakin banyak penduduk akan menambah jumlah angkatan kerja. Penambahan jumlah angkatan kerja di suatu daerah yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan lapangan kerja dapat mengakibatkan surplus tenaga kerja yang tidak dapat terserap, mengakibatkan peningkatan angka pengangguran. Seseorang yang menganggur artinya tidak memiliki penghasilan dan tidak berkontribusi terhadap pendapatan nasional. Dengan tidak berkontribusi terhadap pendapatan, pengangguran akan mempengaruhi keseimbangan distribusi pendapatan. Oleh karena itu, banyaknya angkatan kerja yang terserap di sebuah wilayah yang diukur melalui produktivitas wilayah tersebut, dapat mempengaruhi tingkat ketimpangan pendapatan (Putra & Algifari, 2023).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Indeks Pembangunan Manusia, Dana Alokasi Umum, Dan Angkatan Kerja Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022” dan “Adakah pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Dana Alokasi Umum dan Angkatan Kerja secara simultan maupun parsial terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018–2022”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan ialah ingin mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Dana Alokasi Umum dan Angkatan Kerja secara simultan maupun parsial terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018–2022.

B. Metode Penelitian

Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode analisis deskriptif dengan jenis penelitian kuantitatif. Analisis deskriptif digunakan bertujuan untuk mendeskripsikan objek penelitian ataupun hasil penelitian. Metode kuantitatif atau statistik digunakan dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan jenis data panel (pooled data) yakni dengan menggunakan series tahun 2018-2022 dan cross section terhadap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Adapun sumber data yang digunakan penulis dalam menunjang penelitian ini berasal dari Badan pusat statistik (BPS), Open Data Jabar, jurnal, serta lembaga lainnya yang memiliki keterkaitan dengan topik peneliti (Ningtiyas & Nuraini Dwiputri, 2021).

C. Hasil dan Pembahasan

Hasil Pemilihan Estimasi Model Regresi Data Panel

Dalam penelitian ini untuk menentukan model regresi data panel dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Berikut pengujian model yang terbaik di Provinsi Jawa Barat:

1. Uji Chow

Tabel 1. Hasil Uji Chow

Effect Test	Statistic	d.f.	Prob
Cross-section F	7.106573	(26,105)	0.0000
Cross-section Chi-square	137.042588	26	0.0000

Sumber: Data Penelitian yang Sudah Diolah, 2024.

Tabel di atas diperoleh hasil dari nilai probabilitas sebesar 0,0000 yang artinya nilai probabilitas di atas kurang dari nilai signifikansi 5% ($0.0000 < 0,05$) atau H_0 ditolak dan *Fixed Effect Model* (FEM) yang digunakan di Provinsi Jawa Barat.

2. Uji Hausman

Tabel 2. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	17.849333	3	0.0005

Sumber: Data Penelitian yang Sudah Diolah, 2024.

Tabel di atas diperoleh hasil dari nilai probabilitas sebesar 0,0005 yang artinya nilai probabilitas di atas kurang dari nilai signifikansi 5% ($0.0000 < 0,05$) atau H_0 ditolak, sehingga model yang dapat digunakan adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

Hasil Estimasi

Berdasarkan hasil Uji Chow dan Uji Hausman yang telah dilakukan, maka dinyatakan bahwa *Fixed Effect Model* merupakan model yang sesuai untuk model regresi, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada model penelitian ini menggunakan pendekatan *Fixed Effect Model*.

Tabel 3. Hasil Estimasi *Fixed Effect Model* (FEM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.154242	1.377657	3.015440	0.0032
IPM	0.013624	0.006384	2.134017	0.0352
LOG(DAU)	-0.101997	0.052989	-1.924872	0.0570
LOG(AK)	-0.196643	0.067988	-2.892337	0.0046

<i>R Squared</i>	0.764549
<i>F-statistic</i>	11.75697
<i>Prob (F-statistic)</i>	0.000000
<i>Durbin Watson-Stat</i>	2.002246

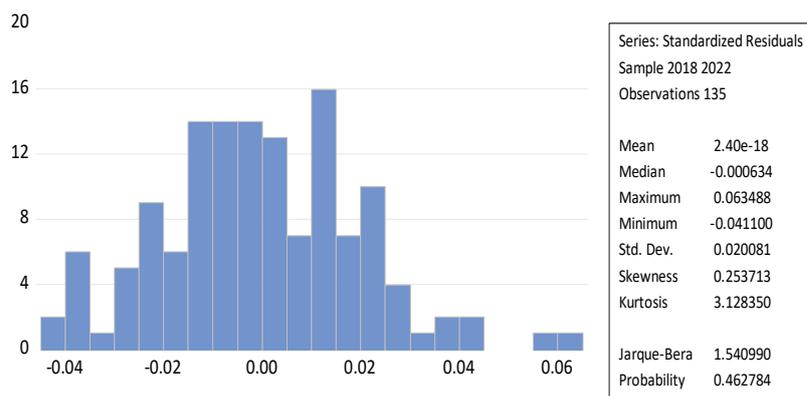
Sumber: Data Penelitian yang Sudah Diolah, 2024.

Dari tabel diatas didapatkan model sebagai berikut:

Persamaan tersebut menunjukkan sebagai berikut: (1) Apabila nilai dari variabel Indeks Pembangunan Manusia, Dana Alokasi Umum dan Angkatan Kerja besarnya sama dengan nol, maka pengaruhnya pada variabel Ketimpangan Pendapatan sebesar 4.15. (2) Jika Indeks Pembangunan Manusia mengalami peningkatan sebesar satu persen, maka akan diikuti dengan peningkatan Ketimpangan Pendapatan sebesar 0.013. (3) Jika Dana Alokasi Umum mengalami peningkatan sebesar satu persen, maka akan diikuti dengan penurunan Ketimpangan Pendapatan sebesar 0.101. (4) Jika Angkatan Kerja mengalami peningkatan sebesar satu perssen, maka akan diikuti dengan penurunan Ketimpangan Pendapatan sebesar 0.20.

Pengujian Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas



Gambar 1. Nilai Probabilitas

Gambar di atas dapat diperoleh nilai Sig. uji normalitas dengan menggunakan *Jarque-Bera* dengan nilai *probability* yang lebih besar dari *alpha* sebesar (0.462784 > 0,05). Dengan begitu maka dapat disimpulkan bahwa residual data berdistribusi normal atau lolos uji normalitas.

2. Uji Multikolinieritas

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas

	IPM(X3)	LOGDAU(X2)	LOGAK(X3)
IPM(X1)	1	-0.290869	0.052776
LOGDAU (X2)	-0.290869	1	0.788294
LOGAK (X3)	0.052776	0.788294	1

Sumber: Data Penelitian yang Sudah Diolah, 2024.

Tabel di atas mengindikasikan bahwa koefisien korelasi antara Indeks Pembangunan Manusia dan Dana Alokasi Umum sebesar $-0,290869 < 0,85$, Indeks Pembangunan Manusia dan Angkatan Kerja sebesar $0.052776 < 0,85$ dan Dana Alokasi Umum dan Angkatan Kerja sebesar $0,788294 < 0,85$. Maka dapat disimpulkan bahwa terbebas dari multikolinieritas atau lolos dari uji multikolinieritas.

Pengujian Statistik

1. Koefisien Determinasi

Tabel 5. Hasil Uji R²

Durbin Watson-Stat	2.002246
--------------------	----------

Sumber: Data Penelitian yang Sudah Diolah, 2024.

Tabel di atas mengindikasikan nilai *Adjusted R-Square* Indeks Pembangunan Manusia, Dana Alokasi Umum, dan Angkatan Kerja bisa menjelaskan perilaku Ketimpangan Pendapatan sebesar 0.764549 atau 76% sisanya sebesar 23% dapat dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

2. Uji t

Tabel 6. Hasil Uji Statistik t

Variabel	t-Statistik	Prob	Hasil Uji	Hasil
IPM	2.134017	0.0352	t-statistik > t-tabel	Signifikan pada $\alpha = 0.05$
DAU	-1.924872	0.0570	t-statistik < t-tabel	Signifikan pada $\alpha = 0.1$
AK	-2.892337	0.0046	t-statistik > t-tabel	Signifikan pada $\alpha = 0.05$

Sumber: Data Penelitian yang Sudah Diolah, 2024.

Tabel di atas dapat dijelaskan dengan tingkat alpha 0,05 adalah sebagai berikut: (a) Hasil uji t pada variabel Indeks Pembangunan Manusia diperoleh nilai t hitung sebesar 2.134017 > dari t tabel yaitu sebesar 1,977961 dan nilai signifikansi sebesar 0.0352 < 0,05 maka, H0 ditolak dan H1 diterima, artinya variabel Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022. (b) Hasil uji t pada variabel Dana Alokasi Umum diperoleh nilai t hitung sebesar 1.924872 < dari t tabel yaitu sebesar 1,977961 dan nilai signifikansi sebesar 0.0570 < dari 0,10 maka, H0 ditolak dan H1 diterima, artinya variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022. (c) Hasil uji t pada variabel Angkatan Kerja diperoleh nilai t hitung 2.892337 > dari t tabel yaitu sebesar 1,977961 dan nilai signifikansi sebesar 0,0046 < dari 0,05 maka, H0 ditolak dan H1 diterima, artinya variabel Angkatan Kerja berpengaruh negatif signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Tahun 2018 - 2022.

3. Uji F

Berdasarkan dari hasil analisis, nilai F hitung 11.75697 > dari F tabel 2,673748 dan nilai signifikansi 0.000000 < dari 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak, artinya variabel Indeks Pembangunan Manusia, Dana Alokasi Umum, dan Angkatan Kerja secara simultan berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022.

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa hipotesis pertama dari penelitian ini dapat diterima. Artinya bahwa Indeks Pembangunan manusia berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang diungkapkan (Ariesta *et al.*, 2022) yang menjelaskan bahwa IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di

DI Yogyakarta. Hasil koefisien regresi yang positif menjelaskan bahwa peningkatan IPM justru meningkatkan ketimpangan pendapatan. IPM yang tinggi belum menjangkau masyarakat DIY secara merata, yang artinya peningkatan IPM masih terpusat pada daerah maju yang justru sudah memiliki IPM yang tinggi.

Selain penelitian yang dilakukan oleh Ariesta (2022), penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Anggina & Artaningtyas, 2017) yang menunjukkan bahwa IPM memiliki hubungan yang positif dengan ketimpangan pendapatan. Hal ini bisa terjadi, dikarenakan naiknya Indeks Pembangunan Manusia hanya dinikmati oleh sekelompok atau golongan orang-orang saja atau dari beberapa wilayah yang ada sehingga fasilitas penunjang tiga dimensi ini hanya dinikmati oleh sebagian wilayah tersebut. Mereka yang mampu menikmati pendidikan formal yang tinggi masih terbatas pada kalangan yang mampu saja. Hal ini menyebabkan kesenjangan pendapatan antara si kaya dan si miskin semakin besar.

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan hasil penelitian di atas ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama dari penelitian ini dapat diterima. Artinya variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Ridho & Wijayanti, 2022) yang menjelaskan bahwa DAU berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Dana Alokasi Umum yang diberikan pusat ke daerah mampu berkontribusi dalam menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan daerah meskipun kontribusinya tidak cukup besar. Berdasarkan (Alfurqani et al., 2021) menjelaskan bahwa pengalokasian dana pemerintah yang mencukupi di suatu daerah diharapkan dapat mendorong pertumbuhan melalui belanja modal sehingga membantu meningkatkan produksi barang dan jasa. Oleh karena itu, daerah yang mendapatkan alokasi dana yang memadai diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan mereka, sementara daerah yang tidak memiliki alokasi dana yang memadai dapat menghambat pertumbuhan daerah tersebut, sehingga kondisi ini berpotensi meningkatkan ketimpangan pendapatan.

Pengaruh Angkatan Kerja terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa hipotesis pertama dari penelitian ini dapat diterima. Artinya bahwa Angkatan Kerja berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Andriaskiton, 2019) yang menunjukkan bahwa variabel Angkatan Kerja merupakan variabel yang signifikan mempengaruhi ketimpangan di Provinsi Sumatera Utara dengan koefisien negatif. Hal ini menjelaskan bahwa apabila Angkatan Kerja di Provinsi Sumatera Utara meningkat maka nilai ketimpangan di Provinsi Sumatera Utara akan meningkat. Hal ini disebabkan oleh migrasi angkatan kerja dari daerah ke Kota Medan dan daerah penopang disekitarnya, seperti Deli Serdang dan Langkat. Migrasi ini tidak bisa dinafikan karena besarnya akses pendidikan yang tersedia dan banyaknya pembangunan industri sehingga menyediakan lapangan pekerjaan yang lebih besar daripada di daerah, yang secara tidak langsung menawarkan kesejahteraan yang lebih baik. Dengan demikian, migrasi angkatan kerja ini berkontribusi pada pengurangan ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah di Sumatera Utara.

Hasil penelitian ini pun sejalan dengan penelitian (Rosalitta & Muljaningsih, 2022) yang menjelaskan bahwa angkatan kerja berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2020. Angkatan Kerja yang signifikan menjelaskan bahwa semakin meningkatnya angkatan kerja dapat menurunkan ketimpangan pendapatan. Hal ini menunjukkan kenaikan angkatan kerja yang tinggi harus diselaraskan dengan perluasan kesempatan kerja dengan tujuan menambah tingkat pendapatan dan mengurangi kemiskinan. Namun, jika tidak diikuti dengan perluasan maka akan menjadi masalah terhadap pembangunan ekonomi yang mengakibatkan meningkatnya kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.

Analisis Ekonomi dengan Tinjauan Perencanaan Daerah

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2005-2025, terdapat visi pembangunan yaitu "Dengan Iman dan Takwa, Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia". Visi ini diwujudkan melalui beberapa misi, antara lain meningkatkan perekonomian yang berdaya saing dan berbasis potensi daerah, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dan mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Adapun tujuan dalam RPJP Provinsi Jawa Barat tahun 2005-2024 yakni mendongkrak ekonomi regional yang mempunyai competitiveness atau kemampuan bersaing melalui berbagai peran masing-masing sektor ekonomi agar dapat mempercepat economic inclusive developing di setiap region.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 Provinsi Jawa Barat memiliki visi, yaitu “Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi” pencapaiannya dijabarkan dalam beberapa misi. Visi dan misi yang terdapat dalam dokumen RPJMD sejalan dengan visi dan misi RPJPD Provinsi Jawa Barat. Meskipun demikian, Provinsi Jawa Barat masih dihadapi seperti; (1) Distribusi pendapatan penduduk belum merata; (2) Penanggulangan kemiskinan belum optimal; (3) Belum optimalnya pembangunan sumber daya manusia; (4) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) rendah; (5) Proporsi penduduk bekerja yang tergolong “pekerja rentan/vulnerable employment” cukup tinggi lebih dari 50 persen.

Permasalahan yang terjadi di Provinsi Jawa Barat dapat mendorong ketimpangan pendapatan. berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh signifikan dan positif terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jawa Barat yang artinya tidak meratanya pertumbuhan IPM diantara daerah Provinsi Jawa Barat. Selain itu, diketahui bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki hubungan yang negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat dan Angkatan Kerja memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan ketiga variabel dependen tersebut dapat menjadi patokan untuk membuat atau merencanakan kebijakan yang harus menjadi fokus dalam perencanaan RPJPD dan RPJMD. Jika dilihat dari dokumen RPJPD dan RPJMD Provinsi Jawa Barat sudah memiliki kebijakan untuk peningkatan Indeks Pembangunan Manusia melalui meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat melalui meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang berdaya saing, meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, dan meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berdaya saing dan mendorong pengembangan pendidikan vokasi yang menjangkau seluruh wilayah. Namun, kebijakan-kebijakan tersebut belum dapat dirasakan di setiap daerah hal ini di dukung dengan tidak meratanya tingkat IPM diantar daerah Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah DAU yang besar dan diketahui juga bahwa DAU menjadi sumber dana yang digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan RPJMD. Oleh karena itu, program-program yang ada dalam RPJMD harus dapat membantu mengatasi Ketimpangan Pendapatan agar DAU dialokasikan dengan tepat sasaran. Dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2022 dilihat dari arah kebijakannya yang dapat membantu untuk mengoptimalkan kualitas Angkatan Kerja tersebut melalui peningkatan kualitas layanan dan memperkuat infrastruktur, memperkuat ekonomi desa. Dalam arah kebijakan yang tertulis di dalam RPJMD tidak terdapat arah kebijakan yang membantu mendorong kesempatan kerja melalui peningkatan lapangan usaha dan peningkatan kualitas angkatan kerja.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut: (1) Indeks Pembangunan Manusia, Dana Alokasi Umum, dan Angkatan Kerja berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan sebesar 76% yang dapat dijelaskan dalam persamaan model. Sedangkan sisanya sebesar 23% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam persamaan model. (2) Besarnya pengaruh variabel bebas terhadap Ketimpangan Pendapatan dapat dilihat dari hasil koefisien setiap variabel, yaitu variabel Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai koefisien sebesar 2.134017. Jika Indeks Pembangunan Manusia mengalami peningkatan sebesar satu persen, maka akan diikuti dengan peningkatan pada Ketimpangan Pendapatan sebesar 2.134017 persen. Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif dan signifikan dengan nilai koefisien sebesar -1.924872, menunjukkan jika Dana Alokasi Umum mengalami peningkatan maka akan mengurangi Ketimpangan Pendapatan. Variabel Angkatan Kerja berpengaruh negatif dan signifikan dengan nilai koefisien sebesar -2.892337. Jika Angkatan Kerja mengalami peningkatan sebesar satu persen, maka akan diikuti dengan penurunan Ketimpangan Pendapatan sebesar -2.892337 jiwa.

Daftar Pustaka

- Alfurqani, H. Z., Widiarsih, D., & Algusri, J. (2021). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Belanja Modal Dan Investasi Terhadap Ketimpangan Pembangunan Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau (1st ed., Vol. 1). *Ecountbis: Economics, Accounting And Business Journal*.
- Andriaskiton, M. (2019). Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Utara (2nd ed., Vol. 3). [Http://Stmb-Multismart.Ac.Id/Ejournal/Index.Php/Jmba/Article/View/37](http://Stmb-Multismart.Ac.Id/Ejournal/Index.Php/Jmba/Article/View/37).

- Anggina, D., & Artaningtyas, W. D. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan Penduduk, Pertumbuhan Investasi, Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007-2014.
- Ariesta, L. C. O. W., Jamzani Sodik, & Didi Nuryadin. (2022). Determinan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten/Kota Dan Keterkaitan Spasial. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(5), 737–754. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i5.79>
- Hasanah, T., Sebayang, A. F., Julia, A., Ekonomi, P. I., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Wilayah Di Kawasan Timur Indonesia Tahun 2012-2017 (Determinant Factors On Regional Inequality In Eastern Indonesia In 2012-2017). *Prosiding Ilmu Ekonomi*, 0(0), 141–149.
- Iqbal Salsabil, & Westi Rianti. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pendidikan, Tingkat Kesehatan dan Laju Pertumbuhan Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2016 – 2020. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 15–24. <https://doi.org/10.29313/jrieb.v3i1.1886>
- Khoirudin, R., & Musta'in, J. L. (2020). Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Tirtayasa Ekonomika*, 15(1), 17. <https://doi.org/10.35448/jte.v15i1.6407>
- Khusnul Khuluk, D. R., Muljaningsih, S., & Asmara, K. (2021). Analisis Disparitas Pendapatan Antar Wilayah Di Daerah Penyangga Surabaya. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 7(1), 9. <https://doi.org/10.35906/jep01.v7i1.762>
- Nadhifah, T., & Wibowo, M. G. (2021). Determinan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 24(1), 39–52.
- Ningtiyas, N., & Nuraini Dwiputri, I. (2021). Analisis disparitas pendapatan di Indonesia tahun 2015-2019: analisis regresi data panel. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Pendidikan*, 1(7), 670–685. <https://doi.org/10.17977/um066v1i72021p670-685>
- Prastiwi, D. H., Lorentino, L. T., Destiningsih, R., & Ekonomi, F. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Di Pulau Jawa Tahun 2014-2018 (1st ed., Vol. 2).
- Putra, I. G. R. M., & Algifari. (2023). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 17(3), 229–240. <https://doi.org/10.53916/jeb.v17i3.66>
- Ramadhan, I. M. S. (2020). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Investasi, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Daerah-Daerah Provinsi Jawa Timur Pada Tahun 2011-2017.
- Raziq, K., & El Hasanah, L. L. N. (2023). Analisis determinan ketimpangan pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan*, 12–21. <https://doi.org/10.20885/JKEK.vol2.iss1.art2>
- Ridho, M. A. M., & Wijayanti, D. (2022). Analisis pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil pajak, dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan*, 71–81. <https://doi.org/10.20885/JKEK.vol1.iss1.art7>
- Rosalitta, D., & Muljaningsih, S. (2022). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pendidikan, Angkatan Kerja, Dan Perpajakan Terhadap Disparitas Pendapatan Di Provinsi Jawa Timur. *Eqien - Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 9(2), 116–125.
- Sherty Veronika, & Mafruhah, A. Y. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Inflasi terhadap Pengangguran Terdidik di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 139–146. <https://doi.org/10.29313/jrieb.vi.1290>
- Sukma, S. M. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk, Dan Pendidikan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014–2019. <https://Dspace.Uii.Ac.Id/Handle/123456789/31368>.

- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Pembangunan Ekonomi* (A. Maulana, Ed.; 11th Ed.).
- Violin, Z. I., & Lutfi, M. Y. (2022). Analisis Ketimpangan Pendapatan Di Pulau Jawa Dan Faktor Yang Mempengaruhinya Tahun 2010-2019. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(1), 227–252. <https://doi.org/10.25105/jet.v2i1.14740>
- Wulandari, D. F., & Rahmawati, F. (2022). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Pembangunan Manusia, dan Tenaga Kerja Terhadap Ketimpangan Pendapatan Indonesia. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 3(3), 583–590. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i3.1216>
- Yoertiara, R. F., & Feriyanto, N. (2022). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, IPM, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan pendapatan provinsi-provinsi di pulau Jawa. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan*, 92–100. <https://doi.org/10.20885/JKEK.vol1.iss1.art9>